

# MEMBACA INDONESIA DALAM *ORANG-ORANG BAWAH TANAH: KUMPULAN NASKAH DRAMA*

Nur Seha

Balai Bahasa Surabaya, Jalan Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo,  
telepon (031) 8051752, pos-el: dzihni@yahoo.com, HP: 081386130989

(Makalah diterima 12 Oktober 2009—Revisi 10 November 2009)

## Abstrak

Sebagai institusi sosial, karya sastra menghadirkan ketidupan dan masalah-masalah realitas sosial dalam masyarakat yang memengaruhi kehidupannya. Itulah sebabnya mengapa karya sastra memiliki fungsi sosial sebagai reaksi, penerimaan, kritik, atau ilustrasi tentang keadaan tertentu sebagaimana Ilham Zoebazary menggambarkan Indonesia sejak Orde Baru hingga reformasi dalam kumpulan naskah dramanya. Kritik yang diketengahkan berhubungan dengan pelayanan pemerintah, perilaku aparat pemerintah, kehidupan rakyat kecil, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.

**Kata-Kata Kunci:** kumpulan drama, orang bawah tanah, rakyat kecil

## READING INDONESIA IN *ORANG-ORANG BAWAH TANAH:* *KUMPULAN NASKAH DRAMA*

### Abstract

As a social institution, a literary work presents a life and consists of—mostly—social realities that influence life. That is why literary works have social functions as a reaction, conception, criticism, or illustration about certain situation. As Ilham Zoebazary describes Indonesia since new era government until reformation period in his collection of drama texts. Criticisms that are presented interrelated with government's service, behavior and attitude of government official, proletariat's life, and so on.

**Keywords:** the collection of drama, underground people, and proletariat

### 1. Pengantar

Pada tahun 80-an, muncul fenomena sastra sufistik sebagai upaya “berhijrah” membangun wilayah baru yang lebih spiritual daripada material dalam rangka memberi harga pada yang rohani di tengah gejala pelecehan rohani karena penempatan ekonomi sebagai panglima. Pembangunan yang sangat berorientasi pada ekonomi menjadikan semua hal sebagai komoditas ekonomi. Bahkan, semua kebijakan nasional berbasis pada perhitungan ekonomi sehingga yang tidak memberi nilai ekonomis dipinggirkan, sedangkan yang serba sementara, profan, material dibiarkan menyerbu kehidupan sehingga menjadi masyarakat hedonis. Orang dinilai bukan pada

keunggulan pribadi, tetapi pada hartanya. Pada dekade 1980-an, juga terjadi pelecehan dan pelanggaran HAM oleh sistem penyelenggara negara. Lembaga perwakilan rakyat (DPR, MPR) dan lembaga-lembaga hukum diintervensi demi status quo kekuasaan.

Di samping suara-suara harus tunggal, di berbagai bidang juga terjadi penyeragaman, seperti dalam memilih warna baju olahraga dan garis tengah jalan harus berwarna kuning. Lantaran informasi-informasi telah dipandang dari satu sudut, imbasnya pada alam bawah sadar sehingga cara berpikir pun menjadi tunggal.

Karena yang lain dibungkam, karya sastra menjadi petarung tunggal saat

menopang suara-suara kemanusiaannya sendiri. Sastra juga berdiri sendirian saat mencitrakan pelanggaran-pelanggaran hak dasar kemanusiaan, yang itu dalam dekade 1980-an demikian merebak dengan gaya-gaya ungkap yang amat beragam. Seakan keragaman gaya ungkap itu ingin mempresentasikan begitu kompleksnya persoalan yang melanda manusia Indonesia (Wachid, 2000:37—38). Pada era seperti itulah, kritik sosial dalam sastra Indonesia cenderung menguat karena sastra selalu menjadi bagian dari persoalan masyarakat di sekitarnya. Dominannya kritik sosial dalam sastra identik pula dengan dominannya masalah sosial dalam kehidupan diluar sastra. Hasil-hasil sastra yang muncul pada penghujung 80-an dan sepanjang era 90-an menunjukkan kecenderungan untuk kembali mengolah tema-tema sosial politik (Sarjono, 2001:97).

Salah satu kumpulan naskah drama yang sarat dengan masalah masyarakat Indonesia dan perlu dibicarakan adalah *Orang-orang Bawah Tanah: Kumpulan Naskah Drama* yang ditulis oleh Ilham Zoebazary. Kumpulan naskah drama ini menggambarkan sebuah masyarakat yang melakukan interaksi berdasarkan faktor kepentingan, kekuasaan, dan politik. *Orang-orang Bawah Tanah* yang menjadi judul pada kumpulan naskah drama ini adalah salah satu judul naskah drama yang ditulis Ilham Zoebazary pada tahun 1999. Kata ini digunakan oleh pengarang untuk menggambarkan kehidupan rakyat kecil dan semua hal yang berkaitan dengannya pada satu masa. Selain itu, banyak hal yang secara tersirat dan tersurat terjadi di tengah-tengah birokrasi kita. Hal tersebut dapat terlihat dari tema-tema yang diangkat dalam *Orang-orang Bawah Tanah: Kumpulan Naskah Drama* karya Ilham Zoebazary. Buku ini memuat lima teks drama yaitu *Cuma Soal Cabe* (1996), *Kudeta* (1989) *Sandiwarra Para Wayang*, *Stasiun Tabrak* (1986), *Bumi Para Wong* (1994), dan *Orang-orang Bawah Tanah* (1999).

Untuk mengungkap relasi teks drama “Orang-Orang Bawah Tanah” dan situasi masyarakat pada masanya digunakan perspektif sosiologi sastra dan konsep-konsep tentang drama. Dalam pandangan sosiologi sastra, karya sastra lahir dalam konteks sejarah dan sosial budaya suatu bangsa yang di dalamnya sastrawan merupakan salah seorang anggotanya. Oleh karena itu, sastrawan tidak terhindar dari konvensi sastra yang ada sebelumnya dan tidak terlepas dari latar sosial budaya masyarakatnya.

De Bonald dalam M. Yocsoef (2007:18—29) mengatakan bahwa sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat. Ada dua faktor yang terkait yaitu sastrawan sebagai anggota masyarakat menyaksikan dan cenderung ingin menanggapi apa yang ada di sekitarnya dan melalui karyanya, seorang sastrawan berusaha membuat sebuah tanggapan terhadap apa yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, sebagai anggota masyarakat, ia mewakili masyarakat mengungkapkan perasaan, sikap, dan pandangannya tentang berbagai persoalan sosial melalui karya sastra. Keterlibatan karya sastra dengan persoalan-persoalan sosial, politik, dan ideologi dapat dibedakan atas dua kecenderungan yaitu karya sastra yang diwarnai kritik sosial yang bersifat temporal dan setempat dan karya-karya yang mampu melewati batas-batas wilayah dan waktu karena menyuarakan persoalan-persoalan kemanusiaan yang universal sifatnya. Dalam karya itu digambarkan bagaimana suatu sistem kekuasaan atau ideologi diterapkan secara represif. Melalui karyanya, sastrawan memberikan tinjauan kritis atas kehidupan manusia dan nilai-nilai baru yang diyakininya ketika ada sebuah sistem yang mengontrol kehidupan mereka. Ada pula yang menyoroti perilaku masyarakat dalam menjamu pejabat pemerintah. Melalui peristiwa-peristiwa yang dialami para tokoh dalam karya sastra, pembaca (penonton) mendapat pengetahuan atau cerminan tentang diri mereka. Dengan demikian, antara karya dan penikmatnya terjalin sebuah komunikasi.

Keterlibatan karya sastra dengan persoalan-persoalan sosial, politik, dan ideologi menghasilkan sastra terlibat, yaitu karya sastra yang digunakan untuk menyebarkan ideologi atau sikap politik tertentu.

Thornton (Barker, 2004:342) mengatakan bahwa pengertian lain dari awalan 'sub' adalah lapis bawah atau bawah tanah. Subkultur dipandang sebagai ruang bagi budaya menyimpang untuk mengasosiasikan ulang posisi mereka atau untuk meraih tempat bagi dirinya sendiri. Pengertian nilai-nilai bawah tanah, nilai-nilai penyimpangan dan kelas diserap melalui keterlibatan dengan sosiologi 'penyimpangan' yang berkembang di Amerika. Serangkaian perilaku kolektif yang dikelola di dalam dan melalui nilai kelas subkultur. Perilaku yang mengganggu kepentingan umum dipahami bukan sebagai patologi individual atau sebagai akibat dari orang yang terbedakan, namun sebagai solusi praktis kolektif terhadap masalah kelas yang muncul secara struktural. Dalam konteks ini, berbagai skenario diajukan dengan karakter 'penyimpangan', antara lain: (1) suatu penolakan dan inversi nilai-nilai kerja, kesuksesan, dan uang pada kelas menengah yang ditetapkan oleh orang-orang usia muda dari kelas pekerja untuk mengatasi berbagai kecacatan dalam konteks tersebut; (2) penetapan dan penekanan pada nilai-nilai bawah tanah dari kelas pekerja, khususnya nilai-nilai waktu luang, hanyalah penyimpangan dari perspektif pengendali sosial kelas menengah; dan (3) usaha orang-orang muda kelas pekerja untuk menetapkan nilai-nilai kesuksesan, kekayaan dan kekuasaan, nilai-nilai hiburan dan hedonisme, melalui jalur alternatif yang ada yang disepakati secara sosial terhalangi oleh struktur kelas.

Sebagai genre karya sastra, drama adalah ragam sastra dalam bentuk dialog yang dimaksudkan untuk dipertunjukkan di atas pentas. Secara lebih khusus, drama lebih menunjukkan lakon yang memperlakukan unsur filsafat dan nilai susila yang agung dan besar (Zaidan, 60:2004).

Secara etimologis, kata drama berasal dari bahasa Yunani, *darm* yang berarti gerak. Tontonan drama memang menonjolkan percakapan (dialog) dan gerak gerak para pemain di panggung. Percakapan dan gerak gerak itu memeragakan cerita yang ditulis dalam naskah. Dengan demikian, penonton dapat langsung melihat, mengikuti dan menikmati cerita tanpa harus membaca naskah dan membayangkannya (Wiyanto, 2004:1). Drama sering disebut sandiwara atau teater. Kata sandiwara berasal dari bahasa Jawa *sandi* yang berarti rahasia dan *warah* yang berarti ajaran. Istilah ini diciptakan oleh Mangkunegara VII kemudian oleh Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambatan, secara tidak langsung. Sandiwara berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tidak terang-terangan. Unsur penting dari drama adalah naskah.

Naskah drama sangat penting sebagai panduan dalam bermain drama atau teater. Teater modern biasanya memakai naskah dalam permainannya. Dengan menggunakan naskah, dialog dan akting para pemain bisa dirancang secara lebih baik. Jadi, bila kita akan mengadakan pertunjukan drama, yang kita butuhkan pertama-tama adalah naskah drama. Naskah drama menurut Usul (2004:31—33) adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Dalam naskah tersebut termuat nama-nama tokoh dalam cerita, dialog yang diucapkan para tokoh, dan keadaan panggung yang diperlukan. Bahkan kadang-kadang juga dilengkapi penjelasan tentang tata busana, tata lampu, dan tata suara.

Untuk memudahkan para pemain drama, naskah ditulis selengkap-lengkapinya, bukan saja berisi percakapan, melainkan juga disertai keterangan atau petunjuk yang sudah lengkap dan sudah siap dimainkan di panggung. Penulisan naskah drama merupakan suatu proses yang utuh, yang mempunyai keseluruhan. Ada unsur-unsur fundamental dalam naskah drama, antara lain penciptaan latar, penciptaan tokoh yang hidup, penciptaan konflik-

konflik, penulisan adegan, dan secara keseluruhan disusun ke dalam sebuah skenario (Komaidi, 2007:231—234). Dalam tulisan ini, drama yang dimaksud adalah dalam bentuk teks tulis, bukan pertunjukannya.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Penguasa yang Tidak Berpihak pada Rakyat

Penguasa adalah orang yang menguasai; orang yang berkuasa untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah dan sebagainya (KBBI, 2003:604). Dalam teks *Orang-orang Bawah Tanah: Kumpulan Naskah Drama* (OBTKND) digambarkan perilaku satuan polisi pamong praja (satpol PP) sebagai orang seram atau anjing pelacak yang senang memporakporandakan barang dagangan kaki lima. Padahal, berjualan di kaki lima merupakan sumber kehidupan mereka. Pada pedagang kaki lima adalah representasi kehidupan rakyat kecil yang serba susah.

“Ah, ternyata kau juga melihat barang-barang ini cuma sebagai barang. Kenapa kau tidak melihat barang-barang milik seseorang sebagai kehidupan seseorang itu?”

“Ah, kau tidak mengerti ... tidak ada orang yang mau mengerti ... (Terisak-isak lagi) Semua ini—barang-barang ini—adalah kehidupan-ku, kehidupan istriku, kehidupan anak-anakku...”

(Zoebazary, 2009:5—6)

Bahkan satpol PP sebagai perpanjangan penguasa digambarkan layaknya manusia anjing yang sangat efektif untuk melanggengkan kekuasaan.

“Ya, ya, itu lebih cepat manusia anjing! Mereka itu anjing-anjing pelacak yang sangat efektif. Scrigala sekalipun tidak akan mampu manandingi instink hewani mereka. Yah, kekuasaan memang selalu membutuhkan banyak anjing.

(Zoebazary, 2009:5—6)

Perilaku negatif ini tidak hanya terjadi pada masa Orde Baru, penertiban para PKL terus terjadi hingga kini tanpa memberikan solusi bagi kelangsungan usaha dan kelanjutan hidup para PKL. Kedatangan para satpol PP menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa bagi para PKL, karena gerobak beserta isinya adalah denyut hidup mereka yang akan diambil dan dirampas paksa tanpa memedulikan hak hidup para PKL. Bahkan belum lama ini, seorang balita tersiram kuah bakso yang mendidih.

Tahun 1998 adalah tonggak reformasi Indonesia yang harus dibayar mahal oleh empat mahasiswa Trisakti yang merengas nyawa di ujung peluru tentara. Oleh karena itu, tak heran dalam teks drama *Orang-orang Bawah Tanah* yang ditulis setahun setelah reformasi, tidak hanya satpol PP, tentara pun tak luput dari sorotan.

“Saya lebih suka memilih pekerjaan seperti ini, halal, diridhai Tuhan. Saya menolak untuk kaya tapi dengan jalan menggadaikan hati nurani. Jadi pejabat, banyak fasilitas, tapi tiap hari membohongi rakyat ...no! **Jadi tentara tapi maniak suka mbedili mahasiswa dan rakyat ... no way!** Saya bilang sekali lagi saya memilih makan dari keringat saya sendiri, bukan dari menghisap keringat orang lain, bukan karena diberi fasilitas oleh babe, om, atau siapapun. Jadi pekerjaan saya ini sama sekali tidak berbau kolusi maupun nepotisme.”

(Zoebazary, 2009:3—4)

Penembakan, penculikan, dan penangkapan juga dilakukan secara semena-mena oleh aparat terhadap para aktivis yang vokal mengkritik kebijakan status quo. Wiji Tukul, Munir, Marsinah, dan aktivis lainnya harus rela kehilangan nyawa dalam perjuangan menuntut hak dan menyuarakan ketidakadilan.

**Orang seram 2:**

Saya harap kita tidak gegabah dalam hal ini. Kita sedang disoroti. Dunia internasional sedang mengarahkan teropongnya pada kita. Kalau penangkapan ini—dengan alasan yang terkesan dibuat-buat—sampai diketahui masyarakat internasional ...

**Orang seram 1:**

Apa peduli kita terhadap opini dunia? Kita ada karena kita bertindak. Dan bertindak artinya menyelidiki, mencekal, menangkap, dan bila perlu mengeksekusi. Paham? (Zoebazary, 2009:35).

Perilaku pejabat yang mengakibatkan hancurnya birokrasi adalah KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dan selalu menyisakan penderitaan rakyat karena apapun yang dimiliki rakyat, akan dirampas dan diambil paksa demi kepentingan pribadi dan atasannya (ABS-asal Bapak senang-istilah populer yang dipakai pada masa Orba). Ini dilukiskan dengan elegan pada dialog Emak yang mengatakan bahwa banyak menteri lainnya yang menyukai ayam milik rakyat, bahkan suka menyantap daging yang diambil dari tubuh rakyat karena mereka adalah sebuah perlambang yang boleh makan dan mengambil apa saja yang berada di bawah bayang-bayang perlambangnya.

Selain dalam teks OBT, praktik suap di kalangan pejabat juga terpapar dalam teks *Bumi Para Wong* (1994). Suap atau sogok menyogok banyak dilakukan demi kelancaran urusan para pejabat tersebut, terutama untuk para penggerak keadilan dan aktivis yang membela rakyat kecil.

**Wong Pinter:**

... Ee ... kebetulan pengawal pribadi saya sudah saya pecat, karena kerjanya tidak efektif dan efisien. Karena itu saya menawarkan lowongan ini padamu. Bagaimana, Wong Laga? Gajinya lumayan lho, belum lagi tunjangannya, obyekannya ... bagaimana, setuju?

**Wong Laga:**

(Pada para warok muda yang lain) Ha...ha...lihat, Le. Dia mau menyuap Wong Laga. Dikira saya ini golongan aktivis yang gampang dibungkam dengan jabatan empuk!

**Wong Pinter:**

(Tersinggung) Saudara-saudara, saya ini tangan kanan Njeng Dipati, lho. Jadi saudara-saudara jangan sembrono, karena setiap kata yang keluar dari mulut saya adalah hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh kawula cilik seperti saudara-saudara ini. Paham? (Zoebazary, 2009:75)

Wong Laga yang berani beradu argumentasi dengan Wong Pinter (pejabat pusat yang sedang melakukan perjalanan dinas ke daerah) tidak mau diberi jabatan empuk karena tahu itu adalah salah satu cara membungkamnya, meski Wong Pinter mengancam dengan mencatut nama pejabat yang lebih tinggi (Njeng Dipati). Naskah ini masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia pasca reformasi. Tidak hanya jabatan, uang menjadi raja bagi sebagian penguasa dan pengusaha untuk membungkam penggerak keadilan, seperti yang belum lama ini terjadi. Lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia mampu disetir dan diarahkan oleh segelintir orang demi kepentingan pribadinya. Banyak rakyat kecil yang kehilangan hak hidup di tanah airnya sendiri, sedangkan pengusaha kaya semakin mendapat tempat menambah pundi-pundi rupiahnya dengan bantuan penguasa yang mau disuap untuk melancarkan izin pendirian usahanya, seperti terlihat pada dialog *Cuma Soal Cabe* (1996).

**Sudi:**

... Pembagian keuntungan itu nanti sifatnya hanya TST. Tidak pakai hitam di atas putih

**Menik:**

apa ada jaminan? Soalnya ndak gampang lho saya minta memo dari Babe, meskipun saya ini anaknya

**Sudi:**

Jangan khawatir. Hal itu sudah saya pikirkan. (Mengeluarkan amplop) Ini, Dik Menik, cash 100 juta. Memang jumlahnya tidak seberapa, tapi ini hanya tahap awal saja. Untuk administrasi

**Manik:**

Tapi jangan lupa de-el-el nya lho.

**Sudi:**

Beres. Langsung akan saya transfer pada rekening Dik Menik.

Praktik suap kadang juga terjadi melalui *kong-kalikong* antarpejabat dan aparat untuk membuka dan membungkam mulut rakyat demi kepentingan penguasa. Selain dengan kekerasan, kekuatan uang juga digunakan. Mereka pun kadang mencari sampingan dengan menggaet pihak swasta.

**Lurah:**

... Aparat yang baik adalah yang memiliki ketrampilan ganda, baik membuka maupun membungkam mulut rakyat. Ngerti?

**Jogoboyo:**

Saya sudah mengerahkan segenap ketrampilan saya dalam hal interogasi, Pak. Malah pakai pentungan segala. Tetap nihil.

**Lurah:**

... Kita kan punya dana cukup besar untuk lobby? Undang mereka ke hotel berbintang, kek, adakan coctail party kek ... tekek kek.

**Sekdes:**

Maksud saya, untuk biaya perjalanan dinas dan dana siluman ... suap alias sogok

**Lurah:**

Wah ... payah, payah kalian ini. (Berpikir) Aha... begini saja Dik Sekdes. Anda saya tugaskan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan pihak swasta, yang tujuan akhirnya tak lain dan tak bukan adalah untuk menggali dana pembangunan.

**Sekdes:**

Pembangunan sektor mana, Pak?

**Lurah:**

Lho, biaya perjalanan dinas, dana siluman dan dana lobby itu kan juga bagian dari proses pembangunan? (Zoebazary, 2009:179—180)

Dalam naskah *Bumi Para Wong* (BPW) yang ditulis pada tahun 1994 (masa Orba) tersirat kebiasaan pejabat pusat yang melakukan perjalanan dinas ke daerah hanya sekadar formalitas. Sambutan berlebihan yang diberikan pejabat daerah dengan spanduk, umbul-umbul, jalan protokol yang diperbaharui dan anak-anak sekolah berbaris di pinggir jalan sambil melambai-lambaikan bendera kecil adalah pemandangan yang biasa terlihat di media cetak dan elektronik saat kunjungan Presiden Soeharto dan pejabat pusat lainnya ke daerah-daerah pada masa itu.

Tujuan utama perjalanan dinas biasanya untuk menggaling suara daerah (mencyragamkan suara agar seolah-olah aspirasinya datang dari daerah). Para pejabat pusat menyiapkan amplop dan peti untuk uang dan souvenir yang biasanya diberikan pejabat daerah saat kunjungan. Menagih komisi dari para pengusaha yang diberi *katetebelece* (surat rekomendasi) dalam memenangkan tender kelas kakap (Zoebazary, 2009:46—48). Ketiga hal tersebut menjadi kritik tajam terhadap perilaku pejabat yang datang ke daerah-daerah. Hal ini masih relevan dengan kondisi sebagian pejabat yang tertangkap karena kasus korupsi. Beberapa dari mereka (sebagiannya anggota dewan terhormat) menerima amplop ucapan terima kasih saat kunjungan kerja ke daerah. Padahal perjalanan dinas mereka sudah ditanggung oleh APBN/APBD yang berasal dari uang rakyat.

Saat para kriminal kerah putih (pejabat) ini mulai terjerat kasus, ada beberapa cara yang digunakan untuk meloloskan diri dari jerat hukum yang berlaku. Tawaran yang dipaparkan dalam *Stasiun Tabrak* (1986) adalah perang layaknya Pandawa melawan Kurawa, menggunakan perempuan sebagai umpan, kekuatan uang, dan ka-

muflase. Sebagai jawabannya ternyata cara paling efektif untuk lolos adalah dengan berbaur bersama pejabat dan berperilaku seperti mereka.

**Boncel:**

Usul yang singkat, Pak. Bagaimana kalau kita gunakan saja sistem kamuflase? Maksudnya begini kita pakai jas, dasi, sepatu pantopel, serta tas koper presiden. Dengan demikian kita akan bebas dari sorotan petugas, Pak.

**Boncel:**

Nah, benar apa kata saya tadi, kan? Dengan kamuflase seperti ini, selamatlah awak dari razia, he ... he ... (Menelpon) Boss, Dajjal dan kawan-kawan sudah menyerahkan diri pada yang berwajib. (Zoebazary, 2009:114)

Citra penguasa dan aparat pemerintah sebenarnya tidak hanya pada sisi negatif saja, Ilham juga berusaha mengingatkan dengan menghadirkan lakon Bagong dan Betara Guru dalam *Kudeta (1989) Sandiwara Para Wayang*. Dalam sebuah pemerintahan perlu adanya pengingat dari rakyat kecil agar penguasa tidak lupa dan lengah dalam ketenangannya. Penguasa perlu memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kondisi dan situasi rakyat atau bawahannya. Kedua hal ini sejatinya menjadi dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sama lain demi kemajuan dan kemakmuran Indonesia saat ini dan yang akan datang.

## 2.2 Makna Kedudukan

Kedudukan dan jabatan yang dimiliki para pejabat kadang tidak dimaknai sebagai sebuah amanah dan tanggung jawab demi menyejahterakan rakyat, ia dipandang hanya sebagai alat penguasa demi kesejahteraan dan kenyamanan pribadi dan golongan pejabat yang bersangkutan. Kala datang ketidaknyamanan atau ketidakseimbangan, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kedudukan tersebut karena kedudukan dan jabatan dianggap

sebagai pusat segala harapan dan tujuan. Hal ini terlihat pada kutipan berikut.

**Bapak:**

Apa kau bilang? Kau yang tidak pernah mengerti apa faedah sebuah kursi. Aku selalu mengerti. Di atas kursi inilah titik pusaran. Maka tidak akan pernah ada energi yang sia-sia untuk menjaganya, merawatnya, dan mempertahankannya.

**Gimbo:**

Ya, memang. Sudah dua puluh tahun lebih saya bergelut dengan ilmu sulap. Saya bisa menyulap apa saja jadi apa saja. Saya bisa menyulap siapa saja jadi siapa saja. Tapi menyulap sebuah kursi ... maaf, saya benar-benar belum bisa. Menyulap kursi adalah trik tertinggi dalam ilmu sulap. Maaf ... maaf, sekali lagi saya minta maaf. (Zoebazary, 2009:21—23)

Karena menganggap kedudukan sangat penting dalam hidupnya, lakon Bapak yang digambarkan sedang menduduki jabatan tertentu, tidak mau menolong anaknya Kasim yang ditangkap aparat karena melakukan tindak subversif (melakukan diskusi gelap tentang kemerdekaan). Bagi Bapak, jabatan atau kursinya lebih penting dan berharga daripada Kasim yang merupakan metafora suara rakyat yang tidak dipedulikan oleh pimpinannya. Bahkan Kasim dikorbankan untuk jamuan saat Presiden datang ke wilayah pemerintahan Bapak. Seperti orang-orang Indonesia lainnya yang memiliki kedudukan dan kerap mengorbankan serta mengabaikan kepentingan rakyat kecil saat sumber daya manusia dan alam yang ada dieksploitasi secara besar-besaran oleh asing dan swasta tanpa menyisakannya untuk masyarakat lokal. Freeport, Blok Cepu dan NAMRU hanyalah sebagian kecil contoh yang berhasil diekspos media.

Kritik tajam terhadap para pemegang kekuasaan yang berkonspirasi ada dalam KSPW (1989). Peristiwa yang belum lama

terjadi antara seorang pengusaha dan lembaga hukum yang ada di Indonesia sebagian terwakili dalam teks ini.

**Puntadewa:**

(tersenyum) Kita ini sudah sama-sama tahu kunci permainan, Pukulan. Pukulan dan saya sama-sama memegang kekuasaan sama-sama menginginkan kekuasaan yang besar dan solid ...

**Puntadewa:**

(tertawa) Saya mengerti maksud Pukulan di balik ini semua. Pukulan takut ada umat manusia yang menonjol. Pukulan takut tersaingi!

**Betara Guru:**

Ya jangan begitu to, Wo. Pokoknya kita lupakan saja semua yang telah terjadi. Ketelanjangan kita hanya untuk kita sendiri, bukan untuk yang di bawah kita. Setuju?

**Puntadewa:**

Terima kasih, Pukulan. Kita benar-benar telah berhasil menjadi sutradara, sekaligus aktor utamanya ... (Zoebazary, 2009:160—161)

### 2.3 Mental Anak Negeri

Dalam OBTKND dilukiskan pula mengenai karakter sebagian anak negeri yang diwakili oleh Kasim. Salah satu penyebab ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa lain adalah budaya membaca yang masih sangat minim dibanding bangsa lain. Budaya berbicara masih mendominasi bangsa ini, maka tak heran perselisihan dan perbedaan selalu diselesaikan dengan adu fisik. Tawuran antarsuku, kampung, RT, suporter sepakbola, geng motor, bahkan kalangan terdidik yaitu pelajar dan mahasiswa selalu menghiasi berita-berita di media cetak dan elektronik tingkat lokal dan nasional. Padahal Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memberi solusi yang berisi. Kritik tersebut diungkap pada dialog berikut.

Kau kempit ayam itu kemana-mana. (Sambil menggergaji salah

satu kaki kursi) Masa kecil sudah belajar ngelus-elus jago. Tidak ada anak-anak muda di Jepang, Jerman atau Amerika yang mengempit ayam. Mereka mengempit buku! Tabu, tidak? Negeri ini sedang berusaha sembuh dari sakit yang teramat panjang dan kronis. Yang dibutuhkannya adalah generasi yang berwawasan kemajuan. Tahu artinya maju? (Zoebazary, 2009:8)

Selain penyebab ketertinggalan, tipikal anak muda sebagai pribadi yang selalu mau tahu, bebas merdeka dan ingin mengubah keadaan dilukiskan pula dalam teks ST (1986).

**Dra'ub:**

Memang harus paham. Tidak bisa tidak. Generasi Bapak sudah sangat renta dan rapuh, sudah waktunya diafikir. Dipensiunkan. Dan generasi kami yang masih penuh vitalitas inilah yang ganti memegang kendali. Paham, Pak?

**Dajjal:**

Dajjal itu, Bu, makhluk yang dirantai Tuhan. Tapi dia tidak putus asa. Digerogotinya rantai itu, meski takkan pernah putus hingga hari kiamat tiba. Dajjal-lah perlambang makhluk yang memburu kemerdekaan, seperti anakmu ini.

**Dajjal:**

... Kemerdekaan yang saya cari bukanlah kemerdekaan dalam arti politik, Bu. Tapi kemerdekaan jiwa ... kemerdekaan seekor rajawali di angkasa raya.

**Ibu:**

Semerdeka-merdekanya seekor burung, Nak, dia takkan pernah mampu menjebol dinding atmosfer. Semuanya serba terbatas, Anakku. Mana ada kemerdekaan tanpa batas? Kemerdekaan tanpa batas itu cuma impian penyair. Ataukah semua itu kau jadikan dalih untuk lari dan bersembunyi dari ketidakmampuanmu menghadapi kehidupan? (Zoebazary, 2009:88—111)



#### 2.4 Hubungan Laki-Laki dan Perempuan

Garis patriarki yang dianut oleh sebagian orang Indonesia memengaruhi pola perlakuan laki-laki terhadap kaum perempuan. Kedudukan perempuan yang sejatinya adalah mitra sejajar bagi laki-laki terkadang dihadapkan pada posisi yang merugikan kala berada pada ranah domestik. Lakon Bapak yang merasa berperan sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan tunggal merasa berhak untuk berlaku semena-mena terhadap Emak dan Kasim anaknya dalam OBT.

**Emak:**

(Sambil membawa ayam dan kurungannya pergi) Laki-laki selalu merasa lebih fasih berbahasa tangan atau kaki daripada berbahasa mulut.

**Bapak:**

Dasar perempuan. Pikirannya tidak pernah berjalan wajar. Hidupnya tidak pernah bahagia kalau diperlakukan wajar. Dan malang benar laki-laki, karena harus menggenapi hidupnya dengan cara berdampingan dengan seorang perempuan.

**Emak:**

Pada akhirnya hanya itu yang bisa kau lakukan. Laki-laki selalu merasa bisa menaklukkan perempuan dengan bahasa tangan dan kaki, dengan tinju atau tendangan. Padahal dengan cara itu, sesungguhnya kamu merendahkan martabatmu serendah-rendahnya. (Zoebazary, 2009:39)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti yang terungkap dalam dialog di atas terlihat pula pada berita media cetak dan elektronik. Terkadang perempuan selaku korban enggan memerkarakannya di tingkat berwajib karena berpikir semua itu adalah aib keluarga. Tidak hanya perempuan selaku istri, KDRT juga terjadi pada pembantu perempuan dan juga anak di bawah umur. Pelaku bisa ayah, paman, majikan, atau bahkan ibu kandung.

#### 2.5 Posisi Rakyat Kecil

Dalam suatu negara, unsur wilayah, pemerintah, dan rakyat adalah tiga komponen yang harus ada. Tanpa salah satu di antara ketiganya, mustahil ada sebuah negara. Teks drama BPW (1994) menempatkan posisi rakyat sebagai pihak yang sering dirugikan dan diacuhkan oleh penguasa. Tekanan atau intimidasi terhadap rakyat dilakukan penguasa atas nama ketertiban dan kestabilan nasional. Oleh karena itu, siapa-pun yang berbeda dengan pendapat penguasa hanya tinggal menunggu waktu untuk disingkirkan. Penguasa adalah pengatur ketertiban dan mereka butuh kepatuhan dan ketaatan rakyat agar kekuatan dan kekuasaan penguasa dapat menjadi pelindung rakyat. Dalam kondisi yang tergecekl akan selalu ada sekelompok rakyat yang tak rela selalu mengganggu pada perintah penguasa.

**Warok Tua:**

Yah, itu memang tidak masuk akal. Tapi kalau itu sudah jadi keputusan Wong Pinter dari kadipaten, kita mau apa? Kita ini kan wong cilik, kaum awam? Gedibal sangalikir paribasane?

**Wong Bagus:**

Betul, Njeng Romo. Wong cilik seperti kita ini ndak boleh menggeleng. Harus mengganggu terus.

**Wong Laga:**

Itu yang saya tidak setuju! Saya tidak menolak untuk membayar pajak dan ngurus sertifikat. Tetapi kalau saya dikentuti saya tidak mau. Saya menolak untuk tutup mulut, mantuk-mantuk, dengan alasan kita ini cuma wong cilik! (Zoebazary, 2009:64—72)

Teks drama *Cuma Soal Cabe* (1996) menyorot monopoli perdagangan dan penentuan harga yang dilakukan penguasa dan mendapat perlawanan dari para petani.

**Siti:**

... Ya, cuma soal cabe. Tapi karena kita adalah wong cilik, dengan penghasilan kecil dari bertanam dan berdagang cabe, maka persoalan itu jadi besar bagi kita. Maka, ketika tangan-tangan korup telah dengan serakah menggerayangi cabe-cabe kita ... siapakah yang menderita? Kita, wong cilik, jelas tercekik. Dan semakin tercekiklah kita, manakala tangan-tangan serakah itu berusaha dengan paksa memonopoli cabe-cabe kita. Dengan kedok menolong, tentunya. Harga ditentukan semaunya, tata niaga dirancang sedemikian rupa, sehingga bagian kita cuma keringat dan keluh kesah. Tapi pada siapa kita berkeluh dan berkesah? Kepada siapa kita mengadu? Payung perlindungan telah berubah jadi tangan hantu dengan jari-jarinya dan kuku-kukunya yang hitam tajam, siap merobek-robek nasib kita. ... (Zoebazary, 2009:169)

Dalih yang dipakai penguasa biasanya mengatasnamakan rakyat, seperti kasus monopoli perdagangan ini. Dengan dalih untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, difungsikanlah koperasi unit dan induk yang ada, tapi penyalur atau yang berhak menjual cabe masih tetap ada di tangan BPC (Badan Pengelola Cabe). Semua itu adalah hasil rapat penguasa yang telah menelan biaya besar tanpa sedikit pun melibatkan petani.

Di antara berjuta rakyat yang ada, akan selalu hadir seorang atau sekelompok orang yang mau berjuang bersama demi kesejahteraan rakyat. Bayaran mahal yang harus ditebus biasanya adalah berhadapan dengan aparat.

**Romo:**

Tentu sajal Perjuangan tidak boleh goyah oleh segepok uang. Nah, karena saya tetap tutup mulut, akhirnya saya diancam. Saya ditakut-takuti! Mereka acungkan senjata ke jidat saya. Tapi senjata itu saya rebut, saya lumat-lumat seperti

kerupuk! Saya juga dibuatkan surat penangkapan untuk dijobloskan ke sel ... Saya dan juga saudara-saudara petani cabe, dituduh telah merongrong kewibawaan mereka. Ya saya jawab seadanya, bahwa saya dan saudara-saudara tidak pernah berusaha merongrong kewibawaan mereka, karena mereka memang tidak memiliki kewibawaan. Yang mereka punya adalah tirani dan penindasan! Maka yang saya dan saudara-saudara lakukan selama ini adalah merongrong tirani dan penindasan (Zoebazary, 2009:195 -196)

Terkadang rakyat kembali pada komunitas dan kepasrahannya pada keadaan yang ada. Inilah ironi yang tersirat pada dialog berikut.

**Abah:**

Jadi, keserakahan ini akan terus tegak berdiri?

**Romo:**

Ya, selama para pembuat keputusan melindunginya

**Abah:**

Ah, betapa malangnya nasib kita

**Romo:**

Apakah Abah mulai berputus asa?

**Abah:**

Ah, entahlah. Hampir satu abad telah kusaksikan berbagai ulah manusia. Dan yang namanya wong cilik seperti kita, pada akhirnya akan selalu diminta kerelaannya untuk berkorban ... selalu dimohon kesediannya untuk menjadi korban. (Zoebazary, 2009: 206)

**2.6 Peran Perempuan**

Meski posisi perempuan pada ranah domestik kadang kurang menguntungkan, namun pada ranah politik ia sering dipergunakan sebagai alat atau umpan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada beberapa kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kasus yang melibatkan petinggi negara di Indonesia baru-baru ini, selalu ada kehadiran sosok perempuan di tengah-tengah

mereka. Kasus Antasari, Al Amin Nasution, dan Anggodo adalah sebagian kasus yang menempatkan perempuan sebagai penyebab, penjamu, dan perantara.

Dalam BPW (1994), Wong Ayu, kekasih Wong Pinter menyamar di tanah perdikan untuk merampas tanah itu dari Warok Tua, namun ternyata Wong Ayu terlanjur mencintai Warok Tua yang menikahnya hingga tak bisa meracuninya dengan racun pelumpuh. Saat diajak pulang ke kadipaten, Wong Ayu tidak mau, padahal Wong Pinter telah mempersiapkan segalanya untuk Wong Ayu.

**Wong Pinter:**

Aduh, Wong Ayu, kamu ini bagaimana?! Kamu kira villa yang baru selesai kubangun di puncak, kereta gres dari Eropa, kuda-kuda kelas satu, dan perusahaan-perusahaan multi nasional milikku ... dari mana sumber dananya? Pinjam di bank, Wong Ayu! Lalu duit dari mana buat melunasi? Dari gajiku sebagai pegawai kadipaten? Coba pikir ...!

**Wong Ayu:**

Dengan meracun dan merampok? Ternyata baru kusadari, bahwa aku tidak bisa melakukan cara-cara seperti itu. (Zoebazary, 2009:69)

Pada *Kudeta* (1989) *Sandiwara Para Wayang*, lakon Bagong berpura-pura menyondokkan istrinya pada Arjuna untuk memperlancar niatnya. Meski pada akhirnya ini hanyalah siasat Betara Guru untuk menunjukkan rendahnya moral Arjuna kepada sang ayah.

**Bagong:**

(Pada penonton) Jangan kaget, salah satu fungsi perempuan adalah melicinkan jalan laki-laki menuju prestasi puncak. Laki-laki jadi mesin, perempuan jadi olihnya. Harus ada yang dikorbankan!

(Pada Arjuna) Excelent! Very-very excelent! Bagaimana, Denmas? Inilah surprise yang hendak saya tunjukkan itu ...

**Arjuna:**

(Masih terpesona) Sungguh tidak kusangka. Bidadari dari kahyanganpun takkan ada yang bisa menyamai kecantikannya ... (Zoebazary, 2009:155)

Selain dua teks di atas, *Cuma Soal Cabe* (1996) juga menyiratkan perempuan sebagai objek yang bisa mendekati kekuasaan. Atas saran Romo, Abah sebagai tetua kampung meminta Siti untuk mendekati Lurah dan berpura-pura menyukainya. Hal tersebut dimaksudkan agar informasi-informasi penting terkait kebijakan dan kepentingan publik dapat diketahui secara akurat. Usaha tersebut berhasil, bahkan membuat rumah tangga Lurah dan istrinya berantakan.

## 2.7 Kinerja Bawahan

Selain kondisi para penguasa yang menduduki jabatan tertentu, dalam OBTKNKD juga digambarkan kondisi para bawahan yang setia menemani para penguasa tersebut. Dalam *KSPW* (1989) terdapat lakon Bagong yang mulai *ngrasami* atasannya, seperti terlihat pada dialog saat Bagong mengingatkan istrinya untuk rapat menghadap Pandawa.

**Bagong:**

Uuh, males. Paling-paling yang dirembug kalau ndak soal pembagian tender, ya soal bagaimana cara mencari tambahan hutang

**Bagong:**

ya biar. Wong para Bendoro Pandowo sekarang ini lagi mabuk kemakmuran. Semua sudah dianggap mapan ...

**Bu Bagong:**

Kalau para Bendoro kendor, ya tugas abdi untuk mengingatkan, supaya kenceng lagi.

**Bagong:**

Itu kan teori. Prakteknya? Ndak gampang, bunc. Salah-salah aku bisa

dimutasi ke bagian perawatan kuda.  
(Zoebazary, 2009:119)

Perilaku dan pola perekrutan pegawai negeri sipil pun tak luput dari sorotan Ilham. Kritik pedas ini terungkap pada dialog berikut.

**Narada:**

... Demi ketertiban administrasi, serta untuk menegakkan disiplin nasional kahyangan, saya akan mengabsensi saudara-saudara semua. Harap maklum, absensi sangat penting bagi pegawai negeri kahyangan. Biar pun produktivitas kerja rendah, yang penting absensi penuh!

**Guru:**

(Memotong) Haa! Itu alasan yang tidak canggih. Kalau urusan dunia semakin ruwet, ya rekrut tenaga baru dong. Tapi yang berjiwa profesional, jangan pakai suap-suapan. Atau jangan-jangan tenaga kedewataan ini banyak yang dari hasil katrolan?  
(Zoebazary, 2009:146)

### 3. Simpulan

Kumpulan naskah drama ini setidaknya dapat menjadi media introspeksi dan cermin perilaku sebagian penguasa sejak prareformasi hingga pascareformasi. Perilaku-perilaku yang terpapar dalam naskah menggambarkan perilaku pejabat/penguasa yang selalu mengkhawatirkan kedudukannya dan menganggapnya sebagai titik pusaran hingga rela melakukan apa saja, mulai mengorbankan sumber daya manusia dan alam, menggadaikan hati nurani, membongki rakyat, menyogok, KKN, politik balas budi, penyalahgunaan jabatan, melaku-

kan konspirasi, dan kebiasaan memperalat perempuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Teks ini juga melukiskan kondisi rakyat kecil yang dipaksa mengalah demi penguasa, penertiban PKL, penculikan, penangkapan yang dilakukan semena-mena oleh petugas, kemerdekaan yang dirampas, idealisme untuk mempertahankan hak, dan kepasrahan. Sebagian generasi muda bermental malas dan tak akrab dengan buku (ilmu pengetahuan). Hubungan antara suami dan istri, anak dan bapak, atasan dan bawahan juga disorot dalam teks ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Komaidi, Didik. 2007. *Aku Bisa Menulis*. Yogyakarta: Sabda Media
- M. Yoesoef. 2007. *Sastra dan Kekuasaan; Pembicaraan atas Drama-drama Karya W.S. Rendra*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Sarjono, Agus R. 2001. *Sastra dalam Empat Orba*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3, Cetakan 2. Jakarta: Balai Pustaka
- Wachid, B.S., Abdul. 2000. *Sastra Melawan Slogan*. Yogyakarta: Sahabat dan Sinergi
- Wiyanto, Usul. 2004. *Terampil Bermain Drama*. Jakarta: Grasindo
- Zaidan, Abdul Razak, dkk. 2004. *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zoebazary, Ilham. 2009. *Orang-orang Bawah Tanah; Kumpulan Naskah Drama*. Jember: Visart Global Media